



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA

KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA
NOMOR : 36/KPTS/KP.100/H.3/01/2026

TENTANG

HONORARIUM PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) PARUH WAKTU PADA PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA

Menimbang : a. bahwa untuk membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura Tahun Anggaran 2026 perlu memperkerjakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu;

b. bahwa para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini perlu diberi honorarium.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Lembaran Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tanggal 7 Desember 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229);

7. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tanggal 30 April 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

8. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tanggal 28 April 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);

9. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tanggal 8 November 2024 tentang Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178 / PMK.05/2018 Tanggal 26 Desember 2018, Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tanggal 20 Mei 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tanggal 2 Desember 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 tanggal 7 Maret 2013 Tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 836/Kpts/KU.010/11/2018 Tanggal 29 November 2018 Tentang Pemberian Mandat Menteri Pertanian Kepada Sekretaris Jenderal Untuk Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran dan Delegasi Menteri Pertanian Kepada Kepala Satuan Kerja Untuk Menetapkan Bendahara Pengeluaran Dan/ Atau Penerimaan Pada Satuan Kerja Lingkup Kementerian;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 893/Kpts/KU.010/12/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Pertanian Mengenai Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Kementerian Pertanian;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 838/Kpts/KU.010/ 12/2018 Tanggal 3 Desember 2018 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Lingkup Kementerian Pertanian;
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 501/Kpts/KP.230/M/07/2025 tanggal 8 Juli 2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian;
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 192/KPTS/KP.230/A/05/2023 tanggal 5 Mei 2023 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
20. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-12/PB/2022 tanggal 27 Oktober 2022 tentang Tata Cara Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan Menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Domestik;
21. Surat Pengesahan Menteri Keuangan tanggal 01 Desember 2025 tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA-018.09.2.025227/2026.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran Nomor SP DIPA-018.09.2.025227/2026 Tanggal 01 Desember 2025.

M E M U T U S K A N

Menetapkan HONORARIUM PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) PARUH WAKTU PADA PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA TAHUN ANGGARAN 2026

- KESATU : Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura yang nama-namanya tercantum dalam kolom 2 dan besar Honorarium seperti tertera dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pembayaran Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dilaksanakan pada setiap bulan bersangkutan yang dibebankan pada DIPA Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura Tahun Anggaran 2026 selama anggaran masih memungkinkan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B O G O R
Pada tanggal : 05 Januari 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian
Hortikultura,



Dr. Inti Pertiwi Nashwari, S.P, M.Si
NIP 197804232002122002

- Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
- 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
 - 2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
 - 3. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
 - 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bogor;
 - 5. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura
Nomor : 36/KPTS/KP.100/H.3/01/2026
Tanggal : 05 Januari 2026

HONORARIUM PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) PARUH WAKTU PADA PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA	TUGAS	BESAR HONOR
1	2	3	4
1	Primma Sontanu	Penata Layanan Operasional	4.100.000
2	Fadhilansyah Kurniawan	Penata Layanan Operasional	4.100.000
3	Satrio Widiarto	Penata Layanan Operasional	3.800.000
4	Dessy Seftiany	Penata Layanan Operasional	3.800.000
5	M Rafli Agustian	Operator Layanan Operasional	3.800.000
6	Yudistira	Operator Layanan Operasional	3.800.000
7	Nur Gunawan	Operator Layanan Operasional	3.800.000
8	Erwin Nurjamil	Operator Layanan Operasional	3.800.000
9	Gin Gin Hendardinata	Operator Layanan Operasional	3.800.000
10	Deni Suhendi	Operator Layanan Operasional	3.800.000
11	Agus	Operator Layanan Operasional	3.800.000
12	Jaka Maulana	Operator Layanan Operasional	3.800.000
13	Heru Purnomo	Operator Layanan Operasional	3.500.000
14	Hilman	Operator Layanan Operasional	3.500.000
15	Khoirunnisa	Penata Layanan Operasional	3.300.000
16	Hasanudin	Operator Layanan Operasional	3.300.000
17	Angga Riyana	Operator Layanan Operasional	3.300.000
18	Suti Margisna	Operator Layanan Operasional	3.300.000
19	Asep Maulana	Operator Layanan Operasional	3.300.000
20	Siti Ropiah Darojah	Operator Layanan Operasional	3.300.000
21	Sambas Khotib	Operator Layanan Operasional	2.100.000
22	Ajat Sudrajat	Operator Layanan Operasional	2.100.000
23	Akri	Pengelola Umum Operasional	2.000.000
24	Mahmud Jayadi	Pengelola Umum Operasional	2.000.000
25	Rosadi	Pengelola Umum Operasional	2.000.000

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi
Pertanian Hortikultura,



Dr. Inti Pertiwi Nashwari, S.P, M.Si
NIP 197804232002122002